

**PRAKTEK PENGAMBILALIHAN TANAH
OLEH PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
DI KALIMANTAN BARAT
“STUDI KASUS PADA MASYARAKAT DAYAK IBAN DUSUN
PAREH DESA SEMUNYING JAYA KECAMATAN JAGOI
BABANG KABUPATEN BENGKAYANG”**

OLEH

DUNASTA

A.21211094

ABSTRACT

Land expropriation is apparently became quite serious discussion in the international community inline with the global food crisis that occurred in 2008. It immediately raises fears of country of its inability to meet the food for its own people. Realizing the impact of food scarcity would be bad for the life of a country. As a result, the "exploitation" of a number of commodities started by each country in order to maintain their food security. In Indonesia, land acquisition practices ocured since the development of oil palm plantations in which the Indonesian government has launched the development of oil palm plantations in the frontier region (Indonesia and Malaysia) along 850 km with an area of 1.8 million hectares with a count of 1,000,000 million hectares will be developed in West Kalimantan Province. Therefore, the productive lands of indigenous peoples for agricultural land and plantation of rubber, local fruits such as durian, and mentawa is converted into oil palm plantations owned by the company. It is certainly threating the Indigenous Peoples who think and treat the land as the only place for their business of agriculture and a place to live. At the same time, the government has issued permits granted to large corporations.

Problems of this research: How is the practices of land acquisition of the Indigenous Dayak Iban of Jaya Pareh sub village of Semunying village, Bengkayang District bythe Oil Palm Company, PT. Ledo Lestari and what are the impacts to the local community when their land is occupied by the company?.

In 2004, PT. Ledo Lestari got license to open oil palm plantation granted by the government of Bengkayang District. Afterwards, the company was directly executing the land clearing in the area of indigenous peoples' customary in where there woods for building materials, rattan to make a *bidai* (mats from rattan), many types of fruits, and the place for hunting. These activities are well-said as their source for income's gathering, and the company came with no consent from the people.

The impacts of oil palm plantation development in the border region has caused changes in the condition of people's livelihood who live and work in there, especially in Semunying Jaya. The impacts for instances, *firstly* is, socio-cultural aspect; conflict in society is ocured and the loss of source of traditional medicine. *Secondly* is, environmental sspects; the loss of

Indigenous forests as the source of people's livelihood and loss of clean water resources; *Thirdly*, economic aspect; loss of rattan as a source of society's potential economy and the loss of plants and *tembawang*. Above-mentioned impacts are causing a crisis of agricultural land.

The conclusion is that the land acquisition practiced by PT. Ledo Lestari over the Indigenous Dayak Iban of Semunying Jaya by doing land clearing is only based on permits issued by local governments Bengkayang through Regent Decree Bengkayang Number . 13 / IL-BPN / BKY / 2004 dated December 20, 2004 regarding the granting of concessions for oil palm plantations to PT. Ledo Lestari of as large as 20,000 Ha area. There is no Indigenous Peoples's consent . The impacts of company's presence to the community are; the conflict in the community, source of traditional medicines disappear, indigenous forest been cleared, source of clean water is polluted, rattan as a source of the local economy is also missing, the community lost their agricultural land as well as lost their plants growing like fruits that will lead to food crisis.

Keywords: Oil Palm, conflict, indigenous peoples, land expropriation, food crisis

ABSTRAK

Pengambilalihan tanah muncul dan menjadi pembahasan yang cukup serius di dunia internasional bersamaan dengan terjadinya krisis pangan global yang terjadi pada tahun 2008 silam. Hal tersebut langsung memunculkan ketakutan bagi negara akan ketidakmampuannya untuk mencukupi pangan bagi rakyatnya sendiri. Menyadari dampak kelangkaan pangan akan berakibat buruk bagi kehidupan sebuah negara, maka kemudian "eksploitasi" terhadap sejumlah komoditas mulai dilakukan oleh masing-masing negara demi menjaga keamanan pangan mereka. Di Indonesia sendiri praktek-praktek pengambilalihan lahan itu terjadi karena pembangunan perkebunan sawit, dimana Pemerintah Indonesia sendiri telah mencanangkan pengembangan pembangunan perkebunan kelapa sawit di wilayah perbatasan (Indonesia-Malaysia) sepanjang 850 km dengan luas 1,8 juta hektar dengan hitungan 1.000.000 juta hektar akan di kembangan di Provinsi Kalimantan Barat, sehingga tanah-tanah masyarakat adat yang produktif untuk lahan pertanian dan perkebunan baik itu karet, buah-buahan lokal seperti durian, langsung, mentawa beralih fungsi menjadi tanaman sawit yang dimiliki oleh perusahaan, hal ini tentu menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat adat, yang beranggapan bahwa tanah merupakan satu-satu tempat usaha pertanian dan tempat untuk hidup, sementara di wilayah mereka, pemerintah telah mengeluarkan ijin usaha perkebunan sawit yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar.

Permasalahan penulisan ini adalah: Bagaimana Praktek-praktek pengambilalihan tanah pada Masyarakat Adat Dayak Iban Dusun Pareh Desa Semunying Jaya Kabupaten Bengkayang yang dilakukan oleh Perusahaan Sawit PT. Ledo Lestari dan Seperti apa dampak-dampak yang dirasakan oleh masyarakat ketika tanahnya sudah kuasai oleh pihak perusahaan PT. Ledo Lestari ?

Setelah Perusahaan PT. Ledo Lestari mengantongi ijin untuk membuka perkebunan sawit di Desa Semunying Jaya pada tahun 2004 dengan ijin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang maka perusahaan langsung menggarap lahan-lahan usaha masyarakat dengan cara melakukan pengusuran dan pembabatan hutan adat milik masyarakat adat semunying jaya yang didalam hutan adat terdapat kayu-kayu untuk bahan bangunan masyarakat, rotan-rotan untuk membuat bidai (tikar dari rotan), jenis-jenis buah-buahan,

tempat berburu dan itu semua merupakan sumber mata pencaharian masyarakat adat Semunying Jaya tanpa terlebih dahulu musyawarah dengan masyarakat adat.

Dampak-dampak Pengembangan perkebunan kelapa sawit di kawasan perbatasan telah menyebabkan perubahan kondisi tatanan kehidupan masyarakat yang hidup dan tinggal di kawasan perbatasan khususnya di Semunying Jaya yaitu *Pertama*, Aspek sosial budaya Terjadinya konflik di masyarakat dan hilangnya Sumber obat tradisional hilang *kedua*, Aspek Lingkungan yaitu Hilangnya Hutan Adat yang menjadi sumber penghidupan dan Hilangnya Sumber air bersih . *Ketiga*, Aspek ekonomi yaitu hilangnya Potensi Rotan sebagai sumber ekonomi masyarakat dan Hilangnya Tanam Tumbuh dan Tembawang sehingga menimbulkan Krisis lahan pertanian

Kesimpulan bahwa Praktek-praktek pengambilalihan tanah pada Masyarakat Adat Dayak Iban Dusun Parih Desa Semunying jaya yang dilakukan oleh Perusahaan Sawit PT. Ledo Lestari dengan cara melakukan pengusuran tanah-tanah masyarakat adat Dayak Iban Dusun Parih Desa Semunying Jaya tanpa melalui musyawarah hanya didasarkan atas ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang melalui Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 13/IL-BPN/BKY/2004 tertanggal 20 Desember 2004 tentang pemberian ijin lokasi perkebunan kelapa sawit kepada pihak PT. Ledo Lestari seluas 20.000 Ha. Dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat atas kehadiran perusahaan tersebut yaitu terjadinya konflik di masyarakat, Sumber obat tradisional hilang, Hutan Adat habis ditebang, Sumber air bersih tercemar, Potensi Rotan yang sebagai sumber ekonomi masyarakat juga hilang, dan diperparah lagi masyarakat tidak punya lahan pertanian, sementara Tanam Tumbuh buah-buahan juga sudah tidak ada lagi sehingga akan mengakibatkan krisis pangan.

Kata kunci : Sawit, konflik, masyarakat adat, pengambilalihan tanah, krisis pangan

1. PENDAHULUAN

Pengambilalihan tanah muncul dan menjadi pembahasan yang cukup serius di dunia internasional bersamaan dengan terjadinya krisis pangan global yang terjadi pada tahun 2008 silam. Hal tersebut langsung memunculkan ketakutan bagi semua negara dunia internasional akan bahaya dari kelangkaan pangan dan muncul sebuah ketakutan bagi negara akan ketidakmampuannya untuk mencukupi pangan bagi rakyatnya sendiri. Menyadari dampak kelangkaan pangan akan berakibat buruk bagi kehidupan sebuah negara, maka kemudian “eksploitasi” terhadap sejumlah komoditas mulai dilakukan oleh masing-masing negara demi menjaga keamanan pangan mereka. “eksploitasi” terhadap komoditas tersebut tidak hanya dilakukan di dalam teritori negara tersebut, namun juga dilakukan diluar teritori mereka. Kerajaan Arab Saudi dan Korea Selatan contohnya, kedua negara tersebut termasuk kedalam negara-negara yang mencoba mengamankan ketersediaan pangan jangka panjang mereka dengan melakukan “penyewaan” lahan di wilayah-wilayah Afrika. Hal tersebut dilatar belakangi oleh laporan *Food and Agriculture Organization (FAO)* yang menyatakan bahwa di wilayah Afrika masih terdapat milyaran hektar lahan yang masih tersedia.¹

Istilah pengambilalihan lahan mengacu pada pembelian, atau penyewaan lahan oleh si “kaya” (biasanya terwakili oleh Korporasi skala besar), negara yang rawan akan kelangkaan pangan, dan investor swasta kepada negara-negara berkembang untuk menghasilkan tanaman kemudian di ekspor.² Dalam melihat praktek pengambilalihan lahan, paling tepat jika melihatnya menggunakan kacamata ekonomi-politik, karena praktek-praktek pengambilalihan lahan selalu berujung pada “pertumbuhan” ekonomi yang dilakukan dengan cara-cara politik. Nyatanya perampasan lahan yang masih terjadi hingga saat ini selalu syarat akan kepentingan politik, namun apapun kepentingannya dan hal tersebut tetap akan mengakibatkan kerugian kepada masyarakat yang lahannya yang diambil untuk segelintir kepentingan.

Praktek-praktek pengambilalihan lahan terus terjadi di hampir seluruh belahan dunia. Terdapat “mitos-mitos” yang mendukung tetap eksisnya praktek perampasan lahan hingga saat ini, yakni: ***Pertama***, adanya anggapan bahwa “lahan” tersebut dapat diakses dan

¹ Muhaimin Iqbal, “Ketika Orang Arab Menanam Padi di Afrika”, diakses dari <http://geraidinar.com/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/84-gd-articles/umum/971-ketika-orang-arab-nenanam-padi-di-afrika> pada 4 Mei 2015.

² Shepard Daniel and Anuradha Mittal, (2009) *The Great Land Grab: Rush for World's Farmland Threaten Food Security for the Poor*, (Oakland: Oakland Institute), hlm: 1

dimanfaatkan karena dinilai “kosong” dan tak berpenghuni. Anggapan tersebut nampaknya didukung oleh laporan Bank Dunia yang menunjukkan masih banyak lahan yang dapat diakses, terutama lahan di negara berkembang, dan negara kurang berkembang. Data Bank Dunia menunjukkan paling tidak terdapat 445 juta hingga 1,7 Miliar hektar lahan di dunia yang dinilai dapat diakses, dengan asumsi bahwa lahan tersebut merupakan lahan kosong, kurang dimanfaatkan, marjinal dan dianggap tersedia.³ Padahal asumsi tersebut kerap kali salah, nyatanya lahan yang dianggap “kosong” tersebut sebenarnya berpenghuni dan bahkan dikelola oleh masyarakat yang mendiami wilayah tersebut. Masyarakat adat biasanya menjadi korban dalam hal ini, dimana wilayah adat mereka yang “belum” diakui oleh Negara kemudian dinilai sebagai lahan yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pihak luar demi kebutuhan ekonomi sejumlah pihak, lantas kemudian masyarakat adat kehilangan wilayah mereka atas nama kepentingan ekonomi.

Kedua, adanya anggapan bahwa pertanian dan perkebunan membutuhkan investasi yang sangat besar. Hal ini dikarenakan padangan yang menganggap bahwa pertanian dan perkebunan merupakan sebuah investasi jangka panjang yang baik bagi sebuah negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka. Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Rostow dalam tahapan linear pembangunan, dimana menurutnya terdapat sebuah tahapan-tahapan bagi negara berkembang untuk dapat berubah menjadi negara maju, dimana prasyarat penting untuk dapat tinggal landas adalah suatu negara harus mampu membangun pertanian, industri dan perdagangannya sehingga mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.⁴ Meskipun teori pembangunan Rostow ini sudah ditinggalkan dan digantikan dengan teori-teori pembangunan yang sifatnya berkelanjutan, namun pembangunan ekonomi melalui perkebunan dan pertanian masih menjadi primadona, dikarenakan hal tersebut tidak hanya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun sekaligus juga menjawab permasalahan akan kelangkaan pangan. Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Juergen Voegele selaku Direktur Departemen Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Bank Dunia, menyatakan bahwa “sektor

³ Pauline Peters, “Conflicts over land and threats to customary tenure in Africa today, Part Two”, diakses dari <http://democracyin africa.org/conflicts-land-threats-customary-tenure-africa-today-part-two/> pada 4 Mei 2015.

⁴ W.W Rostow. 1960. “*The Stage of Economic Growth: a Non-Communist Manifesto*”. (Cambridge: Cambridge University Press), hlm: 4

agrikultur jika dikelola dengan baik maka dapat menunjang dan menguntungkan negara-negara miskin”.⁵

Ketiga, anggapan yang saat ini sedang berkembang dibalik praktek-praktek pengambilalihan lahan di seluruh dunia, yakni anggapan bahwa lahan skala besar dapat menyelesaikan berbagai permasalahan kelangkaan, baik kelangkaan pangan maupun kelangkaan energi. Yang mana kedua hal tersebut ditopang oleh proteksi terhadap lingkungan yang mengedepankan aspek “keberlanjutan”. Krisis pangan global menjadi “teguran” bagi banyak negara bahwa kelangkaan pangan dapat terjadi, dan untuk itu investasi secara besar-besaran pada sektor pangan mulai dikedepankan, agar kelangkaan pangan dapat dihindarkan. Selain pada isu kelangkaan pangan, isu kelangkaan energi juga menjadi hal yang melatarbelakangi terjadinya praktik perampasan lahan. Sumber energi yang digunakan hingga saat ini masih memprimadonakan sumber-sumber energi fosil yang tidak dapat diperbarui dan dapat habis sewaktu-waktu. Jika sumber energi tersebut dieksploitasi secara terus menerus maka kelangkaan energi akan terjadi dan untuk mencegah hal tersebut diperlukan energi alternatif yang dapat menyaingi kebutuhan terhadap energi fosil.

Di Indonesia sendiri praktek-praktek pengambilalihan lahan itu terjadi karena pembangunan perkebunan sawit, dimana Pemerintah Indonesia sendiri telah mencanangkan pengembangan pembangunan perkebunan kelapa sawit di wilayah perbatasan (Indonesia-Malaysia) sepanjang 850 km dengan luas 1,8 juta hektar dengan hitungan 1.000.000 juta hektar akan di kembangan di Provinsi Kalimantan Barat. Menurut data Kementerian Pertanian Indonesia, hingga tahun 2012 luas penggunaan lahan di Indonesia mencapai 39 juta hektar yang dipecah kepada; 8 juta hektar untuk sawah, 11 juta hektar untuk kebun, 5 juta hektar untuk ladang, dan 14 juta hektar lahan yang sementara tidak diusahakan.⁶ Di Indonesia, Kelapa Sawit menjadi komoditas yang diprimadonakan, kurang lebih 10 juta hektar lahan kebun di Indonesia digunakan untuk Kelapa Sawit.⁷ Tingginya permintaan terhadap komoditas kelapa sawit membuat laju pertumbuhan perkebunan sawit terus mengalami

⁵ World Bank (2012) *Rising Global Interest in Farmland: Can it Yield Sustainable and Equitable Benefits?* (Washington DC: World Bank), hlm: xv

⁶ Kementerian Pertanian. 2013. “Statistik Lahan Pertanian”. (Kementerian Pertanian: Jakarta) hlm: 4

⁷ Ridwan Saidi, “2014 Luas Kebun Sawit Nasional 10,2 juta hektar”, diakses dari <http://www.infosawit.com/index.php/news/detail/2014--luas-kebun-sawit-nasional-10-2-juta--hektare-> pada 5 Mei 2015.

peningkatan tiap tahunnya, bahkan laju pertumbuhan mencapai 7% tiap tahunnya.⁸ Hal tersebut juga membawa Indonesia sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia.

Di Provinsi Kalimantan Barat ijin investasi Perkebunan Sawit semakin gencar diberikan oleh pemerintah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten dengan alasan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberi lapangan kerja kepada masyarakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, sehingga tanah-tanah masyarakat adat yang produktif untuk lahan pertanian dan perkebunan baik itu karet, buah-buahan lokal seperti durian, langsung, mentawa beralih fungsi menjadi tanaman sawit yang dimiliki oleh perusahaan, hal ini tentu menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat adat, yang beranggapan bahwa tanah merupakan satu-satu tempat usaha pertanian dan tempat untuk hidup, sementara di wilayah mereka, pemerintah telah mengeluarkan ijin usaha perkebunan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar, tentu masyarakat tidak berdaya untuk melakukan pencegahan atau penolakan karena alasan untuk pembangunan, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan.

2. MASALAH

Bertitik tolak dari pengantar dipaparkan diatas maka kemudian ditarik beberapa masalah adalah: Bagaimana Praktek-praktek pengambilalihan tanah pada Masyarakat Adat Dayak Iban Dusun Parih Desa Semuning Jaya yang dilakukan oleh Perusahaan Sawit PT. Ledo Lestari dan Seperti apa dampak-dampak yang dirasakan oleh masyarakat ketika tanahnya sudah kuasai oleh pihak perusahaan PT. Ledo Lestari ?

3. PEMBAHASAN

Pengelolaan wilayah perbatasan menjadi sebuah isu penting pemerintah pusat karena wilayah perbatasan merupakan garda terdepan sebuah negara, disamping persoalan-persoalan yang mendasar yang terjadi akibat kesenjangan sosial pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan kemiskinan yang hampir disetiap perbatasan kalimantan mengalami kisah buruk, ditambah lagi beberapa persoalan batas wilayah Indonesia dan Malaysia semakin tidak jelas, hal ini yang membuat pemerintah pusat memfokuskan untuk pengelolaan perbatasan.⁹

⁸ Kementrian Pertanian, "Pertumbuhan Areal Kelapa Sawit Meningkat", diakses dari <http://ditjenbun.pertanian.go.id/berita-362-pertumbuhan-areal-kelapa-sawit-meningkat.html> pada 5 Mei 2015.

⁹ Direktorat pengembangan kawasan perbatasan khusus dan tertinggal Deputi bidang otonomi daerah dan pengembangan regional, Badan perencanaan pembangunan Nasional, Nop 2003

Gagasan pembangunan wilayah perbatasan dengan perkebunan kelapa sawit di wilayah perbatasan (Indonesia-Malaysia) sepanjang 850 km dengan luas 1,8 juta hektar dengan hitungan 1.000.000 juta hektar akan di kembangan di Provinsi Kalimantan Barat dan 800.000 ribu hektar di Kalimantan Timur. Pembangunan perkebunan kelapa sawit ini diharapkan akan menyerap tenaga kerja lebih dari setengah juta jiwa dan akan meningkatkan produksi tandan buah segar (TBS) dalam setiap tahunnya sampai dengan 2,7 juta ton. Proyek ini dipercaya akan menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi di wilayah perbatasan, namun yang menjadi pertanyaan apakah pengembangan perkebunan kelapa sawit tersebut akan membawa kemakmuran dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang hidup dan tinggal di kawasan perbatasan?

Hingga diterbitkannya dokumen *submission* oleh Tim Advokasi Perbatasan (TASP) tahun 2009 dan hingga saat ini proyek pembangunan perkebunan sawit perbatasan masih belum jelas, baik soal jarak titik batas nol yang akan digunakan maupun soal pihak pemodal yang akan berinvestasi. Bahkan ketidakjelasan proyek tersebut semakin nampak dengan adanya informasi dari Departemen Pertanian RI yang merilis bahwa pembangunan kelapa sawit di perbatasan justru hanya 180 ribu hektar, bukan 1,8 juta hektar.¹⁰

Lajunya investasi perkebunan sawit di Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Bengkayang sendiri semakin tidak terbendung lagi, dimana kalau kita lihat jumlah produksi kelapa sawit meningkat hal ini bisa terlihat seperti tabel di bawah ini :

| Jumlah Produksi Kelapa Sawit tahun 2013 di Kabupaten Bengkayang : | |
|--|--------|
| Perkebunan Rakyat : 13,688 Ton | |
| Perkebunan Besar : 24,671 Ton | |
| PRODUKSI 2013 (TON) | 38.359 |
| PRODUKSI 2012 (TON) | 22.060 |
| PRODUKSI 2011 (TON) | 32.776 |
| PRODUKSI 2010 (TON) | 28.600 |
| PRODUKSI 2009 (TON) | 25.887 |
| PRODUKSI 2008 (TON) | 23.873 |

¹⁰ Pembangunan perkebunan sawit diperbatasan Indonesia-Malaysia diskriminasi rasial terhadap masyarakat adat

| | |
|--|---|
| LAHAN YANG SUDAH DIGUNAKAN (HA) | 63.248 |
| STATUS LAHAN | Perkebunan Besar : 50,694 Ha Perkebunan Rakyat : 12,554 Ha |

Sumber Data:

Kalimantan Barat Dalam Angka 2014 Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, Jl. Sutan Syahrir No. 24/42 Pontianak 78116 Telp (0561) 735345 Fax (0561) 732184

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa peningkatan Produksi sawit dari tahun ke tahun khususnya di Kabupaten Bengkayang semakin meningkat, hal ini dikarenakan semakin meluasnya konsesi perkebunan besar (sawit) di wilayah ini.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. Ledo Lestari yang merupakan anak perusahaan Duta Palma Nusantara Group tahun 2004 yang mengantongi ijin membangun perkebunan seluas 20.000 ha berdasarkan surat Bupati Bengkayang Nomor 525/1270/HB/2004 yang baru diterbitkan tanggal 17 Desember 2004, kemudian ditetapkan melalui keputusan Bupati Bengkayang Nomor 13/IL-BPN/BKY/2004 tertanggal 20 Desember 2004 tentang pemberian ijin lokasi perkebunan sawit kepada pihak PT. Ledo Lestari.

Perusahaan Grup Duta Palma memiliki sejumlah anak perusahaan yang kini tersebar di Riau, Sumatera dan sisanya di Kalimantan Barat. Perusahaan ini juga memiliki pabrik untuk proses pengkilangan sendiri dari tandan buah segar (TBS) menjadi *Crude Palm Oil (CPO)* atau minyak sawit mentah dan *Palm Kernel/PK* (inti sawit). Adapun Produk turunan dari usaha perusahaan ini di antaranya minyak goreng palma PT. Darmex, *Palm Kernel Oil* dan sabun. Group Duta Palma ini merupakan salah satu anggota dari RSPO (*Rountable on Sustainable Palm Oil*)

Di wilayah pulau Sumatera khususnya Riau, group perusahaan Duta Palma memiliki delapan lahan seluas 63.886 hektar yang dikelola oleh tujuh perusahaannya, yaitu PT. Eluan Mahkota, PT. Johan Sentosa, PT. Wana Jingga Timur, PT. Cerenti Subur, PT. Mekar Sari Alam Lestari, PT. Aditya Palma Nusantara dan PT. Duta Palma Nusantara¹¹. Duta Palma group memiliki sekitar 26 anak perusahaan yang tersebar di Riau dan Kalimantan Barat dengan luas 160.000 ha. Group ini juga memiliki 8 pabrik kelapa sawit yang tersebar di Riau,

¹¹ <http://riaubisnis.com/index.php/agriculture-mainmenu-109/pertanian-news/42-pertanian/281-dituding-rusak-hutan-tropis-unilever-blacklist-cpo-duta-palma>

Jambi dan Kalimantan dengan total produksi CPO sekitar 36.000 Mt setiap bulan¹². Perusahaan Duta Palma Nusantara juga dikenal dengan nama Darmex Group atau Surya Darmadi Group Sejumlah pihak yang merupakan penampung sekaligus pembeli CPO dari Group Duta Palma ini yakni; Cargill (Amerika Serikat), Gardner Smith (Australia), Kumpulan Guthrie (Malaysia), Kuok (Singapura), Wilmar (Singapura) dan PT. Darmex Oil dan Fats (Bekasi, Indonesia).

Setelah Perusahaan PT. Ledo Lestari mengantongi ijin untuk membuka perkebunan sawit di Desa Semunying Jaya pada tahun 2004 dengan ijin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang maka perusahaan langsung menggarap lahan-lahan usaha masyarakat dengan cara melakukan pengusuran dan pembabatan hutan adat milik masyarakat adat semunying jaya yang didalam hutan adat terdapat kayu-kayu untuk bahan bangunan masyarakat, rotan-rotan untuk membuat bidai (tikar dari rotan), jenis-jenis buah-buahan, tempat berburu dan itu semua merupakan sumber mata pencharian masyarakat adat Semunying Jaya.

DAMPAK-DAMPAK YANG DIALAMI OLEH MASYARAKAT ADAT DUSUN PAREH DESA SEMUNYING JAYA DENGAN MASUKNYA PERUSAHAAN SAWIT PT.LEDO LESTARI

Dampak-dampak Pengembangan perkebunan kelapa sawit di kawasan perbatasan telah menyebabkan perubahan kondisi tatanan kehidupan masyarakat yang hidup dan tinggal di kawasan perbatasan khususnya di Semunying Jaya di lihat beberapa aspek yaitu :

1. Aspek sosial budaya

Jauh sebelum masuknya perkebunan kelapa sawit masih sangat kental dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, sehingga segala persoalan selalu mengedepankan semangat dan rasa kekeluargaan. Semangat kekeluargaan tersebut selalu di jaga dan lestarikan oleh masyarakat Semunying Jaya sejak dahulu, namun sejalan dengan masuknya perkebunan kelapa sawit di Desa semunying Jaya telah merubah tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat, kehadiran PT. Ledo Lestari Desa Semunying Jaya telah menimbulkan dampak negatif terhadap perubahan tatanan sosial dan budaya masyarakat di Desa Semunying Jaya di antaranya:

¹² Lihat buku Kebal dari Jangkauan Hukum, terbitan AMAN Kalbar – Telapak, Februari 2010.

a. Terjadinya konflik di masyarakat

kehadiran Perusahaan PT. Ledo Lestari di Desa Semunying Jaya yang telah menimbulkan konflik sosial di tingkat masyarakat. Terjadinya pengkotak - kotakan antara warga yang pro dan kontra terhadap perkebunan kelapa sawit, saling curiga dan berprasangka negatif antara warga merupakan cerminan imbas dari kondisi yang telah di ciptakan oleh PT.Ledo Lestari sejak beroperasi tahun 2005.

Dampak lain dari akibat konflik sosial yang terjadi di semunying jaya tersebut adalah sebagian besar warga Desa Semunying Jaya termarginalkan dari komunitasnya dan mencoba untuk memisahkan diri guna menghindari pertikaian antar sesama warga, menurut *keterangan warga yaitu pak Jamaludin* ada 20 KK yang sedang mempersiapkan pemukiman baru di ***Daerah Metang Abe***. saat ini tahap awal sudah di lakukan oleh masyarakat yaitu dengan membuat perladangan di dearah tersebut.

b. Sumber obat tradisional hilang

Selain memiliki nilai ekonomis, keanekaragaman hayati yang ada di kawasan hutan juga memiliki nilai medis bagi masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar kawasan hutan. potensi alam yang bernilai medis yang ada di hutan sebagian besar dapat di gunakan sebagai apotik hidup (ramuan obat tradisional) oleh masyarakat dan sudah dilakoni sejak turun temurun. Beralih fungsinya kawasan hutan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dengan menebangi hutan dan tidak menyisakan sebatang pohon pun secara tidak langsung telah menghilangkan potensi medis atau apotik hidup yang ada di kawasan hutan tersebut.

2. Aspek Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup manusia, jika kondisi lingkungan rusak maka telah memutuskan rantai kehidupan manusia. Kegiatan ekonomi seharusnya dapat memperhatikan kelestarian lingkungan hidup terutama kondisi lingkungan yang ada di sekitar kawasan kegiatan ekonomi tersebut. Pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang terjadi saat ini merupakan aktivitas terbesar yang berkontribusi dalam kerusakan lingkungan di Kalimantan Barat. Kegiatan pembukaan perkebunan kelapa sawit di Desa Semunying Jaya yang di lakukan oleh PT.Ledo Lestari telah mengabaikan aspek – aspek lingkungan, ada beberapa hal yang terjadi di Desa Semunying Jaya yang juga merupakan wilayah perbatasan negara di antaranya:

a. Hilangnya Hutan Adat

Ditengah keinginan besar warga dunia untuk menyelamatkan hutan, pada saat itu pula perusahaan perkebunan sawit PT. Ledo Lestari melakukan konversi hutan besar-besaran dari hutan hujan tropis menjadi perkebunan sawit. hasilnya, bukan hanya menghilangkan banyak pohon semata, tetapi juga menghilangkan fungsi hutan sebagai kawasan penyangga. Tindakan ini tentu kontras ketika disatu sisi banyak pihak menyerukan pentingnya menyelamatkan hutan. Semakin berkurangnya hutan hujan tropis di dunia menjadi keprihatinan banyak pihak yang patut mendapat perhatian. Karena hutan hujan sangat berkontribusi besar untuk menetralsir gas rumah kaca yang dihasilkan manusia di planet Bumi. Praktek penghancuran hutan seperti ini tentunya harus menjadi perhatian yang serius berbagai pihak khususnya pemerintah di berbagai penjuru dunia yang telah berkomitmen untuk mengurangi pengaruh pemanasan global bagi kehidupan.

b. Hilangnya Sumber air bersih

Berkaitan dengan hak atas air, sesuai dengan komentar umum PBB No.15, Indonesia berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas air¹³. Sedangkan kebijakan yang khusus mengatur tentang sumberdaya air adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air. Dalam hal ini pemenuhan hak atas air bagi setiap warganya, *negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif*¹⁴. Dampak lain yang di rasakan oleh masyarakat desa Semunying Jaya akibat masuknya perkebunan sawit adalah krisis akan air bersih. Hal ini di sebabkan sebagian besar kawasan hutan penyangga telah kehilangan fungsinya sebagai penyediaan air tanah, juga penggunaan pestisida beracun saat melakukan pemeliharaan tanaman akan berimbas pada kualitas air. Pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit oleh pihak PT. Ledo Lestari telah mengakibatkan rusaknya *Sungai Semunying* sebagai sumber air bersih masyarakat dengan menurunnya kualitas air (keruh) akibat erosi lapisan tanah dari lahan perkebunan kelapa sawit.

3. Aspek ekonomi

Sumber daya alam merupakan sumber penghidupan masyarakat terutama masyarakat yang hidupnya menggantungkan diri pada alam, potensi alam yang ada dapat di kelola

¹³ Dokumen komentar Umum PBB Nomor 15

¹⁴ Lihat Pasal 5 UUNomor 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

menjadi sumber ekonomi masyarakat seperti kayu, rotan damar dan masih banyak lagi. Dari kawasan hutan yang beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit di desa semunying jaya telah menghilangkan beberapa sumber alam yang selama ini menjadi sumber ekonomi masyarakat semunying jaya. Ada beberapa potensi sumber daya alam yang hilang akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit di semunying jaya di antaranya:

a. Potensi Rotan sebagai sumber ekonomi masyarakat di sektor hutan hilang

Jauh sebelum sawit masuk masyarakat masih bisa mengandalkan potensi hutan yang ada di Desa Semunying Jaya. Rotan misalnya, sejak lama masyarakat Semunying Jaya memanfaatkan rotan sebagai salah potensi hasil hutan yang bisa di uangkan (cash income). Menurut pengakuan masyarakat “*pak Jamaludin*¹⁵” bahwa dalam 1 hari masyarakat bisa menghasilkan uang dari aktivitas merotan Rp 50.000 – Rp. 75.000/hari, bahkan mengingat potensi rotan alam yang ada di kawasan hutan cukup besar sehingga Desa Semunying Jaya merupakan salah satu pemasok rotan terbesar di 2 kota Kecamatan (Jagoi Babang dan Seluas). Namun seiring hilangnya kawasan hutan setelah masuknya perkebunan kelapa sawit telah menghilangkan potensi alat (rotan) yang sejak dulu menjadi salah satu andalan masyarakat.

b. Hilangnya Tanam Tumbuh dan Tembawang

Kegiatan pembukaan lahan di wilayah konsesi perkebunan sawit PT. Ledo Lestari telah mengusur sejumlah lahan tanam tumbuh warga berupa kebun karet dan tanaman buah-buahan serta lahan tembawang. Kebun karet dan tembawang oleh masyarakat merupakan sumber kehidupan utama bagi masyarakat di Semunying Jaya dan kebut karet merupakan aktivitas ekonomi yang di tekuni oleh masyarakat Semunying Jaya untuk mendapatkan penghasilan. Dalam praktek pembebasan lahan untuk perkebunan kelapa sawit oleh PT. Ledo Lestari sampai terutama untuk areal kebun karet dan tanah warga yang digusur masih menyisakan sejumlah persoalan khususnya mengenai ganti kerusakan yang di miliki warga Semunying Jaya.

c. Krisis lahan pertanian

Pangan yang aman, sehat, dan terjangkau mestinya selalu tersedia bagi semua orang. Pangan juga harus tersedia saat bencana, gagal panen, atau situasi khusus lain. Ini prinsip utama hak atas pangan. Sebagai produsen bahan pangan, harusnya warga yang dalam hal ini petani tidak mengalami rawan pangan. Nyatanya, petani dan keluarganya menjadi

¹⁵ Warga masyarakat Dusun Pareh Desa Semunying Jaya

masyarakat miskin yang rawan kelaparan dan gizi buruk. Hak atas pangan khususnya bagi petani seringkali dilanggar oleh negara yang seharusnya melindungi. Ini terjadi karena disamping institusi gagal melaksanakan kebijakan bersifat melindungi petani, juga karena kebijakan pemerintah terkait pangan dan pertanian yang lebih pro pasar¹⁶. Kebijakan perkebunan sawit skala besar juga berpotensi melahirkan sejumlah dampak sosial bagi persoalan dan ketersediaan sumber pangan warga di kampung, terlebih bila kawasan hutan dan ruang kelola yang menjadi sumber hidup dan kehidupannya selama ini diambil alih oleh pemodal.

4. PENUTUP

Adapun yang menjadi kesimpulan dari penulisan ini adalah :

1. Bahwa Praktek-praktek pengambilalihan tanah pada Masyarakat Adat Dayak Iban Dusun Parih Desa Semuning Jaya yang dilakukan oleh Perusahaan Sawit PT. Ledo Lestari dengan cara melakukan pengusuran tanah-tanah masyarakat adat Dayak Iban Dusun Parih Desa Semuning Jaya tanpa melalui musyawarah tetapi hanya didasarkan atas ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang melalui Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 13/IL-BPN/BKY/2004 tertanggal 20 Desember 2004 tentang pemberian ijin lokasi perkebunan kelapa sawit kepada pihak PT. Ledo Lestari seluas 20.000 Ha, dimana setelah mengantongi Ijin perusahaan langsung melakukan pembebasan lahan dan pengusuran tanah-tanah masyarakat
2. Pembukaan perkebunan sawit di daerah perbatasan khususnya di Dusun Parih Desa Semuning Jaya Kabupaten Bengkayang membawa dampak bagi masyarakat yang berada dalam wilayah perbatasan di lihat dari beberapa aspek yaitu :

A. Aspek sosial budaya

Tatanan kehidupan masyarakat di Semuning Jaya, jauh sebelum masuknya perkebunan kelapa sawit masih sangat kental dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, sehingga segala persoalan selalu mengedepankan semangat dan rasa kekeluargaan. Semangat kekeluargaan tersebut selalu di jaga dan lestarian oleh masyarakat

¹⁶ Dikeluarkannya konsesi untuk PT. Ledo Lestari adalah bentuk dari sikap pemerintah yang pro terhadap pasar, sementara warga yang seharusnya dijadikan sebagai penentu diabaikan. Lihat; “Kedaulatan Pangan Perjuangan Hak atas Pangan dan Hak Petani” dalam http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/indonesia/27-kedaulatan-pangan/editorial/at_download/article_pdf

Semuning Jaya sejak dahulu, namun sejalan dengan masuknya perkebunan kelapa sawit di Desa semuning Jaya telah merubah tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat, kehadiran PT. Ledo Lestari Desa Semuning Jaya telah menimbulkan dampak negatif terhadap perubahan tatanan sosial dan budaya masyarakat di Desa Semuning Jaya di antaranya:

a. Terjadinya konflik di masyarakat

kehadiran Perusahaan PT. Ledo Lestari di Desa Semuning Jaya yang telah menimbulkan konflik sosial di tingkat masyarakat. Terjadinya pengkotak - kotakan antara warga yang pro dan kontra terhadap perkebunan kelapa sawit, saling curiga dan berprasangka negatif antara warga merupakan cerminan imbas dari kondisi yang telah di ciptakan oleh PT.Ledo Lestari sejak beroperasi tahun 2005.

b. Sumber obat tradisional hilang

Selain memiliki nilai ekonomis, keanekaragaman hayati yang ada di kawasan hutan juga memiliki nilai medis bagi masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar kawasan hutan. potensi alam yang bernilai medis yang ada di hutan sebagian besar dapat di gunakan sebagai apotik hidup (ramuan obat tradisional) oleh masyarakat dan sudah dilakoni sejak turun temurun. Beralih fungsinya kawasan hutan menjadi lahan perkebuna kelapa sawit dengan menebangi hutan dan tidak menyisakan sebatang pohon pun secara tidak langsung telah menghilangkan potensi medis atau apotik hidup yang ada di kawasan hutan tersebut.

B. Aspek Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup manusia, jika kondisi lingkungan rusak maka telah memutuskan rantai kehidupan manusia. Kegiatan ekonomi seharusnya dapat memperhatikan kelestarian lingkungan hidup terutama kondisi lingkungan yang ada di sekitar kawasan kegiatan ekonomi tersebut. Pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang terjadi saat ini merupakan aktivitas terbesar yang berkontribusi dalam kerusakan lingkungan di Kalimantan Barat. Kegiatan pembukaan perkebunan kelapa sawit di Desa Semuning Jaya yang di lakukan oleh PT.Ledo Lestari telah mengabaikan aspek – aspek lingkungan, ada beberapa hal yang terjadi di Desa Semuning Jaya yang juga merupakan wilayah perbatasan negara di antaranya:

a. ***Hilangnya Hutan Adat***

Ditengah keinginan besar warga dunia untuk menyelamatkan hutan, pada saat itu pula perusahaan perkebunan sawit PT. Ledo Lestari melakukan konversi hutan besar-besaran dari hutan hujan tropis menjadi perkebunan sawit. hasilnya, bukan hanya menghilangkan banyak pohon semata, tetapi juga menghilangkan fungsi hutan sebagai kawasan penyangga. Tindakan ini tentu kontras ketika disatu sisi banyak pihak menyerukan pentingnya menyelamatkan hutan. Semakin berkurangnya hutan hujan tropis di dunia menjadi keprihatinan banyak pihak yang patut mendapat perhatian. Karena hutan hujan sangat berkontribusi besar untuk menetralsir gas rumah kaca yang dihasilkan manusia di planet Bumi. Praktek penghancuran hutan seperti ini tentunya harus menjadi perhatian yang serius berbagai pihak khususnya pemerintah di berbagai penjuru dunia yang telah berkomitmen untuk mengurangi pengaruh pemanasan global bagi kehidupan.

b. ***Hilangnya Sumber air bersih***

Berkaitan dengan hak atas air, sesuai dengan komentar umum PBB No.15, Indonesia berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas air¹⁷. Sedangkan kebijakan yang khusus mengatur tentang sumberdaya air adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air. Dalam hal ini pemenuhan hak atas air bagi setiap warganya, *negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif*¹⁸. Dampak lain yang di rasakan oleh masyarakat desa Semunying Jaya akibat masuknya perkebunan sawit adalah krisis akan air bersih. Hal ini di sebabkan sebagian besar kawasan hutan penyangga telah kehilangan fungsinya sebagai penyediaan air tanah, juga penggunaan pestisida beracun saat melakukan pemeliharaan tanaman akan berimbas pada kualitas air. Pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit oleh pihak PT. Ledo Lestari telah mengakibatkan rusaknya *Sungai Semunying* sebagai sumber air bersih masyarakat dengan menurunnya kualitas air (keruh) akibat erosi lapisan tanah dari lahan perkebunan kelapa sawit.

5. Aspek ekonomi

Sumber daya alam merupakan sumber penghidupan masyarakat terutama masyarakat yang hidupnya menggantungkan diri pada alam, potensi alam yang ada dapat di kelola

¹⁷ Dokumen komentar Umum PBB Nomor 15

¹⁸ Lihat Pasal 5 UUNomor 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

menjadi sumber ekonomi masyarakat seperti kayu, rotan damar dan masih banyak lagi. Dari kawasan hutan yang beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit di desa semunying jaya telah menghilangkan beberapa sumber alam yang selama ini menjadi sumber ekonomi masyarakat semunying jaya. Ada beberapa potensi sumber daya alam yang hilang akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit di semunying jaya di antaranya:

a. Potensi Rotan sebagai sumber ekonomi masyarakat di sektor hutan hilang

Jauh sebelum sawit masuk masyarakat masih bisa mengandalkan potensi hutan yang ada di Desa Semunying Jaya. Rotan misalnya, sejak lama masyarakat Semunying Jaya memanfaatkan rotan sebagai salah potensi hasil hutan yang bisa di uangkan (cash income). Menurut pengakuan masyarakat “*pak Jamaludin*” bahwa dalam 1 hari masyarakat bisa menghasilkan uang dari aktivitas merotan Rp 50.000 – Rp. 75.000/hari, bahkan mengingat potensi rotan alam yang ada di kawasan hutan cukup besar sehingga Desa Semunying Jaya merupakan salah satu pemasok rotan terbesar di 2 kota Kecamatan (Jagoi Babang dan Seluas). Namun seiring hilangnya kawasan hutan setelah masuknya perkebunan kelapa sawit telah menghilangkan potensi alat (rotan) yang sejak dulu menjadi salah satu andalan masyarakat.

b. Hilangnya Tanam Tumbuh dan Tembawang

Kegiatan pembukaan lahan di wilayah konsesi perkebunan sawit PT. Ledo Lestari telah mengusir sejumlah lahan tanam tumbuh warga berupa kebun karet dan tanaman buah-buahan serta lahan tembawang. Kebun karet dan tembawang oleh masyarakat merupakan sumber kehidupan utama bagi masyarakat di Semunying Jaya dan kebut karet merupakan aktivitas ekonomi yang di tekuni oleh masyarakat Semunying Jaya untuk mendapatkan penghasilan. Dalam praktek pembebasan lahan untuk perkebunan kelapa sawit oleh PT. Ledo Lestari sampai terutama untuk areal kebun karet dan tanah warga yang digusur masih menyisakan sejumlah persoalan khususnya mengenai ganti kerusakan yang di miliki warga Semunying Jaya.

c. Krisis lahan pertanian

Semenjak masuknya Perusahaan sawit PT. Ledo Lestari tempat usaha pertanian masyarakat mulai berkurang hal ini menyebabkan aktivitas pertanian masyarakat tidak lagi menjadi sumber utama untuk mencukupi kebutuhan pangan. Ini tentu akan berpengaruh pada tingkat kemiskinan yang akan semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Muhaimin Iqbal, “Ketika Orang Arab Menanam Padi di Afrika”, diakses dari <http://geraidinar.com/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/84-gd-articles/umum/971-ketika-orang-arab-nenanam-padi-di-afrika> pada 4 Mei 2015.

Shepard Daniel and Anuradha Mittal, (2009) *The Great Land Grab: Rush for World's Farmland Threaten Food Security for the Poor*, (Oakland: Oakland Institute), hlm: 1

Pauline Peters, “Conflicts over land and threats to customary tenure in Africa today, Part Two”, diakses dari <http://democracyinafrica.org/conflicts-land-threats-customary-tenure-africa-today-part-two/> pada 4 Mei 2015.

W.W Rostow. 1960. “*The Stage of Economic Growth: a Non-Communist Manifesto*”. (Cambridge: Cambridge University Press), hlm: 4

Tirto, Riwanto, 2009. Dalam Laporan Penelitian Dinamika Sosial Budaya Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat; ”Perspektif Demografi Politik Daerah Perbatasan Kalimantan Barat”

AMAN Kalbar – Telapak, Februari 2010, Kebal dari Jangkauan Hukum

Adam, Hendrikus 2009. Dalam Makalah; Tantangan dan Perjuangan Masyarakat Adat (Dayak) dalam Mewujudkan Keadilan Ekologi.

Data BPS Bengkayang 2010

Wawancara : Pak Momonus, Pak Jamaludi, Pak Nuh, Pak Abulifah, Ibu Frasniska di Dusun Pareh Desa Semunying Jaya, 2015.

